

Outline Journal of Economic Studies

Journal homepage: <http://outlinepublisher.com/index.php/OJES>

Research Article

Determinants of Social Security Participation in the Informal Sector: The Role of the Human Development Index and Regional Infrastructure

(Determinan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Sektor Informal: Peran Indeks Pembangunan Manusia dan Infrastruktur Daerah)

Nugraha Pratama^{1*}

¹Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya, Indonesia

*Correspondence: nugrahapratama@unsri.ac.id

Keyword:

social security
human development index
regional infrastructure
BPJS ketenagakerjaan
panel data

Abstract

Purpose: This study aims to determine the influence of the Human Development Index and Regional Infrastructure on the Coverage of Employment Social Security Participation in the Informal Sector using sample data from 34 provinces in Indonesia for the 2022-2024 period. **Methods:** The research method used is a quantitative approach with panel data regression analysis. **Result:** The analysis results indicate that the Human Development Index and Regional Infrastructure have a positive and significant effect on the coverage of social security participation for informal sector. **Conclusions:** A high Human Development Index will have a positive impact not only on individual welfare but also on expanding the coverage of employment social security programs. Infrastructure development will also facilitate and broaden access to social security services and enhance an individual's economic capacity to participate. **Originality:** This research provides a novel contribution by empirically testing and confirming that the variables of the Human Development Index and Regional Infrastructure are determining factors for social security participation in the hard-to-reach informal sector segment. These findings enrich the literature with a structural perspective that offers more integrated policy solutions.

Article history:

Received:

1 October 2025

Revised:

11 October 2025

Accepted:

16 October 2025

Available Online:

17 October 2025

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Pasal 1 (1) menyatakan bahwa: Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Dengan demikian, jaminan sosial (*social security*) pada prinsipnya merupakan bentuk perlindungan sosial yang berfungsi untuk menanggulangi berbagai risiko agar seluruh rakyat terjamin haknya dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak.

Jaminan sosial diimplementasikan sejalan dengan prinsip negara kesejahteraan (*welfare state*). Konsep jaminan sosial secara umum mencakup semua upaya dalam sektor kesejahteraan sosial yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup manusia dalam menghadapi kemiskinan, ketergantungan, keterasingan, dan keadaan terpuruk. Pemikiran yang mendasarinya adalah bahwa jaminan sosial dapat dianggap sebagai suatu sistem yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan menimbulkan rasa aman sepanjang hidup.

Program jaminan sosial bagi tenaga kerja berupaya mengatasi berbagai risiko sambil menciptakan kenyamanan kerja yang aman serta mendorong peningkatan produktivitas. Jaminan sosial bagi tenaga kerja berfungsi untuk memperkuat kemandirian serta martabat individu dalam menghadapi tantangan sosial dan ekonomi. Program ini menyediakan perlindungan dasar untuk para pekerja dan keluarga dengan menawarkan perlindungan terhadap kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Sistem jaminan sosial di Indonesia memegang peranan penting dalam menjaga kesejahteraan dan keamanan para pekerja. Salah satu lembaga pemerintah yang berfokus pada bidang jaminan sosial ketenagakerjaan adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, yang berstatus sebagai badan hukum publik dengan tujuan memberikan perlindungan bagi para pekerja di Indonesia.

Sektor informal merupakan penopang utama perekonomian banyak negara berkembang, termasuk di Indonesia. Namun, pekerja di sektor ini seringkali tidak terjangkau oleh program jaminan sosial. Pemerintah Indonesia telah membuat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mengamanatkan jaminan sosial bagi seluruh penduduk, termasuk pekerja informal. Namun, implementasinya menghadapi tantangan kompleks dan tingkat kepesertaan yang masih rendah menjadikan mereka sangat rentan terhadap guncangan ekonomi, sakit, kecelakaan kerja, dan ketiadaan pendapatan di hari tua.

Kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di sektor informal memiliki peranan yang sangat signifikan karena memberikan perlindungan dari risiko kecelakaan kerja, kehilangan pekerjaan, dan kematian. Tanpa adanya jaminan sosial, para pekerja di sektor informal seringkali menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan mendasar mereka, terutama keadaan darurat. Pekerja yang terdaftar dalam program jaminan sosial menunjukkan kondisi kesejahteraan yang lebih baik jika dibandingkan dengan mereka yang tidak terdaftar. Ini menunjukkan bahwa jaminan sosial dapat berfungsi sebagai sistem perlindungan sosial yang efektif (Anggita et al., 2024).

Namun, meskipun pentingnya jaminan sosial, banyak pekerja informal yang tidak bersedia untuk mendaftar. Menurut penelitian Pangesti et al., (2024), beberapa faktor seperti kurangnya sosialisasi mengenai manfaat jaminan sosial, rendahnya pemahaman tentang prosedur pendaftaran, dan keterbatasan infrastruktur menjadi penghalang utama. kualitas layanan dan kepuasan pelanggan dapat meningkatkan loyalitas pelanggan BPJS Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih baik mengenai determinan kepesertaan jaminan sosial di sektor informal sangat diperlukan untuk meningkatkan partisipasi.

Tabel 1.
Cakupan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Pekerja Informal Tahun 2020-2024

Tahun	Kepesertaan Bukan Penerima Upah (Jiwa)	Pekerja Informal (Jiwa)	Cakupan Kepesertaan Informal (Persen)
2020	2.494.994	77.682.335	3.2
2021	3.551.858	77.908.445	4.6
2022	6.004.021	80.240.131	7.5
2023	9.192.755	82.666.862	11.1
2024	9.899.338	83.826.206	11.8

Sumber: BPS, Kemnaker, data diolah (2025)

Berdasarkan tabel 1. di atas menunjukkan bahwa umlah peserta bukan penerima upah meningkat lebih dari 4 kali lipat dalam 5 tahun, dari 2,5 juta jiwa (2020) menjadi hampir 9,9 juta jiwa (2024). Dari hanya 3,2% pada tahun 2020, cakupan berhasil ditingkatkan menjadi 11,8% pada tahun 2024. Artinya, dari 100 pekerja informal, hampir 12 orang telah tercatat sebagai peserta. Meskipun pertumbuhannya impresif, angka 11,8% pada 2024 menunjukkan bahwa masih ada sekitar 88% pekerja informal (sekitar 73,9 juta jiwa) yang belum terjangkau

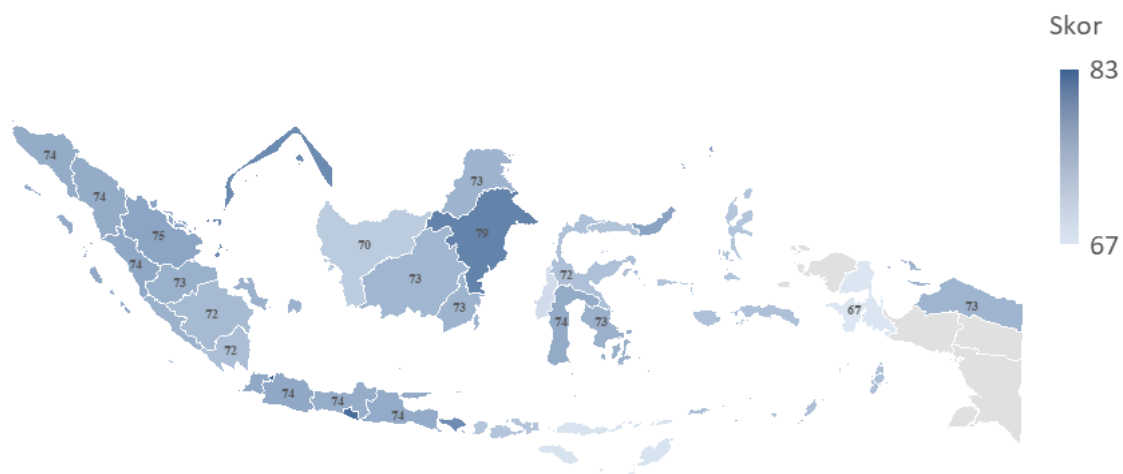
oleh program kepesertaan ini. Ini menunjukkan masih besarnya potensi dan tantangan untuk terus melakukan edukasi dan perluasan akses.

Tenaga kerja di sektor informal atau yang disebut juga sebagai pekerja mandiri adalah individu yang melakukan pekerjaan tanpa terikat dalam sebuah hubungan kerja formal, dan mereka menghadapi berbagai tantangan serta risiko. Oleh karena itu, pekerja di sektor ini harus diberikan perlindungan serta peningkatan kesejahteraan. Sektor informal sering kali mencakup hal-hal seperti perdagangan, industri rumahan, dan penyediaan layanan kecil, serta berperan sebagai pelengkap dalam perekonomian nasional. Pertumbuhan sektor informal ini ternyata memberikan solusi baru dalam menciptakan lapangan kerja bagi mereka yang berusia produktif. Faktanya, sektor ini telah menjadi sumber dukungan bagi lebih dari sepertiga orang yang mencari pekerjaan. Menurut data BPS tahun 2024, 59.4% bahwa Tenaga kerja di Indonesia terlibat dalam sektor informal, memberikan lebih dari setengah kesempatan kerja di Indonesia, mendorong perekonomian daerah dan bergantung pada pekerjaan yang tidak tetap. Jumlahnya terus meningkat seiring berjalannya waktu, dengan adanya tren keseluruhan yang menunjukkan pertumbuhan.

Kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di sektor informal tidak hanya penting untuk melindungi individu, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Teori kesejahteraan sosial menekankan bagaimana jaminan sosial membantu mencapai kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Teori ini menegaskan bahwa memberikan perlindungan sosial yang memadai sangat penting agar setiap orang, terutama yang rentan dan hidup dalam kemiskinan dapat memperoleh akses terhadap kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan dan keamanan ekonomi. Oleh karena itu, teori kesejahteraan sosial menekankan pentingnya adanya kebijakan jaminan sosial yang menyeluruh dan inklusif guna mencapai kesejahteraan bersama serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Nurhadi et al., 2024). Dengan demikian, penting untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepesertaan jaminan sosial di sektor ini, termasuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Infrastruktur Daerah.

Dalam konteks ini, IPM menjadi indikator penting yang mencerminkan kualitas hidup masyarakat. IPM terdiri dari tiga komponen utama: harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita. Peningkatan IPM di suatu daerah dapat berkontribusi pada kesadaran Masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Saragih & Pasaribu, (2025) mengatakan Jaminan sosial memiliki peranan yang sangat berarti dalam pengembangan manusia di Indonesia. Oleh karena itu, evaluasi yang terus-menerus dan upaya untuk meratakan program oleh para pengambil keputusan diperlukan untuk memaksimalkan dampaknya. Salah satu teori ekonomi yang relevan untuk penelitian ini adalah teori pilihan rasional, yang menjelaskan bahwa orang akan membuat keputusan setelah menilai biaya serta manfaat. Dalam hal keikutsertaan jaminan sosial, pekerja di sektor informal akan menimbang antara keuntungan jaminan sosial dan biaya pendaftaran yang harus mereka tanggung. Dengan demikian, peningkatan pemahaman mengenai manfaat dan kemudahan akses dapat mendorong lebih banyak pekerja untuk berpartisipasi dalam program jaminan sosial.

Gambar 1.
Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Tahun 2024



Sumber: BPS (2025)

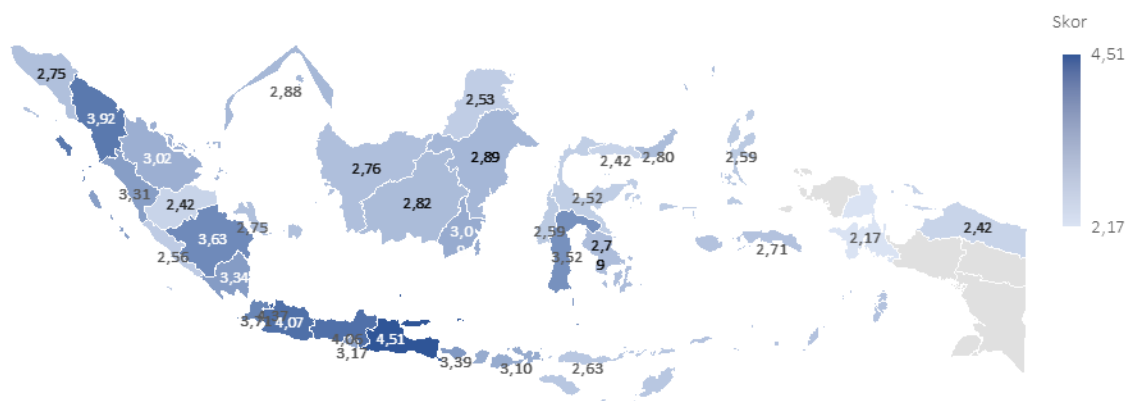
Pada Gambar 1. di atas bahwa sebagian besar provinsi di Indonesia berada dalam kategori IPM tinggi. Ini menunjukkan bahwa tingkat pembangunan manusia di Indonesia secara nasional sudah berada pada level menengah atas. Hanya 3 provinsi yang berada di kategori IPM sedang, yaitu Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat dan Papua Barat. Ini menandakan adanya ketertinggalan pembangunan. Dengan tidak ada provinsi di Indonesia yang masuk dalam kategori rendah, ini merupakan sebuah pencapaian yang positif.

Dalam penelitian Arrazeq et al., (2024), bahwa hubungan antara indeks pembangunan manusia dan kesejahteraan masyarakat sangatlah dekat. Wilayah yang memiliki indeks pembangunan manusia yang tinggi biasanya mempunyai akses yang lebih baik terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, yang pada gilirannya dapat memperbaiki kualitas hidup masyarakat. BPJS Ketenagakerjaan menawarkan manfaat penting bagi pekerja dengan memberikan perlindungan dari risiko sosial, meningkatkan kualitas hidup, dan memberikan rasa aman untuk masa depan pekerja.

Namun, meskipun IPM dapat menjadi indikator yang baik untuk menilai kesejahteraan, penting juga untuk mempertimbangkan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kepesertaan jaminan sosial, seperti infrastruktur dan sosialisasi. Pentingnya memperluas perlindungan sosial kepada pekerja informal, dan menemukan bahwa kerangka regulasi pemerintah serta sistem iuran (asuransi) adalah kunci untuk mencapainya. Untuk melindungi pekerja informal, pemerintah perlu menciptakan regulasi yang kuat yang mendorong hubungan kerja standar dan sistem jaminan sosial berbasis iuran, melalui kolaborasi dengan semua pihak yang terlibat (Moh, Dashapatra & Sahoo, 2025).

Infrastruktur di sebuah wilayah mencakup berbagai macam fasilitas yang mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat, seperti transportasi, layanan kesehatan, dan pendidikan. Adanya infrastruktur yang baik dapat mendukung kelancaran kegiatan ekonomi, meningkatkan efisiensi, serta pada akhirnya memperkuat daya saing daerah. Infrastruktur yang baik sangat penting untuk meningkatkan akses terhadap layanan jaminan sosial bagi para pekerja informal. Wilayah dengan sistem transportasi yang baik membantu pekerja dalam menjangkau kantor layanan jaminan sosial, sehingga meningkatkan kemungkinan mereka untuk mendaftar. Salah satu bentuk infrastruktur yang berperan penting terhadap partisipasi dalam jaminan sosial adalah fasilitas kesehatan. Di samping itu, infrastruktur pendidikan juga ikut berkontribusi pada peningkatan pemahaman masyarakat mengenai manfaat jaminan sosial, yang mendorong mereka untuk turut serta. Meski demikian, masih ada tantangan besar dalam pengembangan infrastruktur di beberapa daerah, terutama daerah yang terpencil. Oleh karena itu, pengembangan infrastruktur yang merata merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan keterlibatan pekerja informal dalam program jaminan sosial.

Gambar 2.
Infrastruktur dalam Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Tahun 2024



Sumber: BRIN (2025)

Berdasarkan Gambar 2. di atas menunjukkan bahwa Terdapat kesenjangan yang sangat besar antara provinsi dengan skor tertinggi (4.51) dan terendah (2.17). Pulau Jawa secara konsisten mendominasi peringkat atas, menunjukkan pembangunan infrastruktur terpusat dan memiliki infrastruktur yang baik. Indonesia Bagian Timur (Pulau Papua, Maluku, Sulawesi bagian Tengah, dan NTT) secara umum masih tertinggal dalam hal

infrastruktur masih sangat membutuhkan percepatan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, penelitian ini juga akan menggali dampak dari infrastruktur daerah, yang mencakup aksesibilitas transportasi dan fasilitas kesehatan. Aksesibilitas infrastruktur layanan kesehatan, aksesibilitas infrastruktur layanan kesehatan, ketersediaan tenaga medis, fasilitas pendukung, kualitas layanan, dan disparitas regional menjadi faktor yang mempengaruhi keikutsertaan peserta jaminan kesehatan nasional. Pengetahuan, pendapatan, pandangan masyarakat, pendidikan, dan infrastruktur kesehatan adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi minat masyarakat terhadap keikutsertaan menjadi peserta JKN. Terutama faktor infrastruktur pelayanan kesehatan, ketidakmerataan infrastruktur pelayanan kesehatan dapat mempengaruhi keikutsertaan peserta JKN (Lubis et al., 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh Andjar, (2023) bahwa implementasi jaminan sosial belum diikuti oleh sebagian besar pekerja sektor informal karena beberapa kendala, seperti, para pekerja masih belum mengerti tentang program jaminan sosial ketenagakerjaan dan juga belum mendapatkan akses ke program ini. Faktor lain adalah rendahnya tingkat pendidikan pekerja, pengaruhnya terhadap pengetahuan mereka yang lebih rendah. Oleh karena itu, situasi ini menyebabkan lebih sedikit akses ke informasi program oleh pekerja informal. Dampak pembangunan infrastruktur terhadap perubahan sosial dan ekonomi masyarakat adalah, pertama, pembangunan infrastruktur berfungsi sebagai faktor penggerak sosial, yang dapat meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lebih lanjut. Kedua, meskipun pembangunan infrastruktur ini memiliki dampak positif seperti peningkatan kualitas hidup masyarakat dan juga penyediaan lapangan kerja (Nurhasna & Dani, 2025).

Muhlis, (2022) dalam penelitiannya mengatakan bahwa bahwa faktor utama yang menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi dalam program JKN adalah faktor sosio-demografis seperti usia yang muda, pendidikan yang rendah dan jumlah anggota keluarga yang banyak. Selain itu, terdapat faktor-faktor yang berkaitan dengan kesehatan dan aspek lain yang relevan seperti rendahnya pemahaman mengenai asuransi kesehatan, terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan, kualitas layanan kesehatan yang belum maksimal, prosedur administrasi yang kompleks, adanya stigma negatif, data kepesertaan yang belum tepat, serta kondisi kesehatan yang kurang baik.

METODE

Penelitian ini menggunakan Metode analisis yang digunakan adalah metode regresi data panel dengan data sampel 34 Provinsi di Indonesia dari tahun 2022-2024 yang meliputi aspek-aspek yang mempengaruhi jaminan sosial ketenagakerjaan antara lain indeks pembangunan manusia dan infrastruktur daerah. Data yang dipergunakan adalah data sekunder yang bersumber dari berbagai laporan seperti dari Badan Pusat Statistik, Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Mengingat data panel merupakan gabungan dari data cross section dan data time series, maka modelnya dapat dituliskan sebagai berikut:

$$COVRG_{it} = \beta_0 + \beta_1 IPM_{1it} + \beta_2 INFRS_{2it} + e_{it}$$

Keterangan :

$COVRG_{it}$ = Coverage Kepesertaan Informal

β_0 = Konstanta

IPM_{1it} = Indeks Pembangunan Manusia

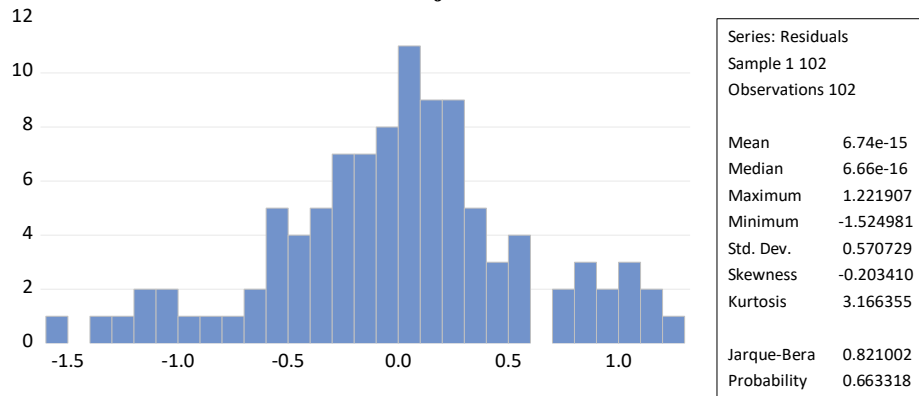
$INFRS_{2it}$ = Infrastruktur Daerah

e_{it} = Komponen error pada unit observasi ke-i dan waktu ke-t

Tahapan uji dalam penelitian adalah dilakukan uji asumsi klasik yaitu Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas dan Uji Heteroskedastisitas agar hasil estimasinya baik dan memenuhi kriteria BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*). Dalam regresi data panel harus melalui tahapan penentuan model estimasi yang tepat melalui tiga pendekatan yaitu *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*. Untuk memilih model yang paling tepat terdapat beberapa pengujian yang dapat dilakukan, antara lain: Uji Chow untuk pengujian menentukan model *Common Effect* atau *Fixed Effect*. Kemudian dilanjutkan Uji Hausman untuk pengujian memilih model *Fixed Effect* atau *Random Effect* yang paling tepat digunakan. Model yang terpilih dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambar 3.
Hasil Uji Normalitas



Hasil uji normalitas di atas adalah nilai jarque bera sebesar 0,821002 dengan p value sebesar 0,663318 dimana $> 0,05$ yang berarti data berdistribusi normal.

Tabel 2.
Hasil Uji Multikolinieritas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	26929976	9078571.	NA
IPM	1.99E-06	348433.8	1.073452
INFRS	5.38E-05	9691522.	1.073452

Berdasarkan hasil pengolahan data di atas menunjukkan bahwa nilai Centered VIF baik IPM dan INFRS adalah 1,073452 dimana nilai tersebut kurang dari 10, maka dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat multikolinearitas.

Tabel 3.
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey			
Null hypothesis: Homoskedasticity			
F-statistic	1.347675	Prob. F(2,99)	0.2646
Obs*R-squared	2.703425	Prob. Chi-Square(2)	0.2588
Scaled explained SS	14.57807	Prob. Chi-Square(2)	0.0007

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya Heteroskedastisitas dengan melihat Prob. chi square(2), karena probabilitasnya $0,2588 > 0,05$ maka dapat kita simpulkan bahwa model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 4.
Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	14.827434 217.24606	(33,66)	0.0000
Cross-section Chi-square	4	33	0.0000

Dari tabel hasil Uji Chow di atas, diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,000 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi ($0,000 < 0,05$). Dengan nilai probabilitas ini, maka dapat disimpulkan bahwa model yang terpilih untuk analisis ini adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

Tabel 5.
Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	9.420997	2	0.0090

Dari hasil Uji Hausman, diperoleh nilai probabilitas yaitu sebesar 0,0090 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi ($0,0090 < 0,05$). Berdasarkan nilai probabilitas tersebut, maka model yang terpilih untuk analisis ini adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

Tabel 6.
***Fixed Effect Model* (FEM)**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-336.1573	98.78793	-3.402818	0.0011
IPM	4.673483	1.364112	3.426026	0.0011
INFRS	4.395744	2.003998	2.193487	0.0318
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
Root MSE	5.913918	R-squared	0.886516	
Mean dependent var	17.29412	Adjusted R-squared	0.826335	
S.D. dependent var	17.64198	S.E. of regression	7.351965	
Akaike info criterion	7.098377	Sum squared resid	3567.391	
Schwarz criterion	8.024838	Log likelihood	-326.0172	
Hannan-Quinn criter.	7.473532	F-statistic	14.73084	
Durbin-Watson stat	2.564806	Prob(F-statistic)	0.000000	

Berdasarkan hasil pengolahan data pada Tabel 6 di atas dengan menggunakan aplikasi Eviews 12, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$$\text{COVRG} = -334.1573 + 4.673483\text{IPM} + 4.395744\text{INFRS}$$

Persamaan diatas menunjukkan bahwa jika nilai IPM dan INFRS tidak berubah maka nilai COVRG adalah -334.1573. Sedangkan setiap 1% kenaikan nilai IPM maka akan menaikkan 4.6734831% nilai COVRG dan setiap 1% kenaikan nilai INFRS maka akan menaikkan 4.3957441% nilai COVRG.

Uji F Simultan

Pada Tabel 4.3. Nilai F hitung dari model regresi adalah sebesar 114,73084 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0000 dengan tingkat signifikansi ($\alpha = 0,05$), nilai probabilitas lebih kecil dari α . Artinya, variabel Indeks Pembangunan Manusia dan Infrastruktur Daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap *Coverage* Kepesertaan Informal.

Uji T Parsial

Berdasarkan hasil estimasi pada lampiran 3. diketahui nilai t hitung untuk variabel IPM sebesar 3.426026 dengan nilai probabilitas sebesar 0.0011 dengan tingkat signifikansi ($\alpha = 0,05$), nilai probabilitas lebih kecil dari α . Artinya, variabel IPM memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap *Coverage* Kepesertaan Informal.

Untuk variabel INFRS nilai t hitung sebesar 2.193487 dengan nilai probabilitas sebesar 0.0318 dengan tingkat signifikansi ($\alpha = 0,05$), nilai probabilitas lebih kecil dari α . Artinya, variabel INFRS memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap *Coverage* Kepesertaan Informal.

Uji Koefisien Determinasi

Hasil uji koefisien determinasi yang terdapat pada table 4.3. bahwa didapatkan nilai R^2 atau (*R square*) adalah sebesar 0,826335 artinya bahwa variasi dalam variabel Indeks Pembangunan Manusia dan Infrastruktur Daerah dapat dijelaskan sebesar 82,63% dari variabel *Coverage* Kepesertaan Informal sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

Analisis Ekonomi

Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap *Coverage* Kepesertaan Informal

Variabel IPM memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap *Coverage* Kepesertaan Informal di Indonesia. Artinya, bila nilai IPM mengalami peningkatan maka nilai *Coverage* Kepesertaan Informal akan meningkat. Nilai koefisien IPM sebesar 4.6734831, artinya jika IPM naik 1 persen maka *Coverage* Kepesertaan Informal akan meningkat sebesar 4.6734831.

IPM yang tinggi tidak hanya mencerminkan kualitas hidup yang baik, tetapi juga mendorong perluasan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui Peningkatan akses ke sektor informal, kesadaran akan pentingnya jaminan sosial dan kemampuan finansial untuk berpartisipasi. Oleh karena itu, kebijakan yang bertujuan meningkatkan IPM seperti peningkatan akses pendidikan berkualitas, layanan kesehatan, dan pengentasan kemiskinan akan berdampak positif tidak hanya pada kesejahteraan individu, tetapi juga pada inklusi sosial dan perluasan cakupan program jaminan sosial ketenagakerjaan secara nasional.

Pengaruh Infrastruktur Daerah Terhadap *Coverage* Kepesertaan Informal

Variabel INFRS memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap *Coverage* Kepesertaan Informal di Indonesia. Artinya, bila nilai INFRS mengalami peningkatan maka nilai *Coverage* Kepesertaan Informal akan meningkat. Nilai koefisien INFRS sebesar 4.395744I, artinya jika INFRS naik 1 persen maka *Coverage* Kepesertaan Informal akan meningkat sebesar 4.395744I.

Infrastruktur berperan sebagai katalisator yang menciptakan kondisi bagi tumbuhnya sektor informal, mempermudah dan memperluas akses kepada layanan jaminan sosial dan meningkatkan kapasitas ekonomi individu untuk berpartisipasi. Pemerintah tidak hanya harus fokus pada pembangunan infrastruktur fisik (jalan, listrik), tetapi juga infrastruktur digital (jaringan internet) untuk memperluas *Coverage* kepesertaan Informal. Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi kunci untuk memaksimalkan dampak ini. Dengan demikian, investasi dalam infrastruktur bukan hanya mendongkrak PDB, tetapi juga membangun perlindungan sosial yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan regresi data panel maka dapat diambil kesimpulan hasil yang signifikan mengenai pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Infrastruktur Daerah terhadap *Coverage* Kepesertaan Informal di Indonesia yang dijelaskan melalui koefisien sebesar 4.6734831 dan probabilitas sebesar $0.0011 < 0,05$. Infrastruktur Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Coverage* Kepesertaan Informal dengan koefisien sebesar 4.395744I dan probabilitas sebesar $0.0318 < 0,05$. Hasil uji hipotesis secara simultan mendukung kesimpulan tersebut, dengan nilai F-statistik sebesar 114,73084 dan probabilitas sebesar $0,0000 < 0,05$, menunjukkan variabel Indeks Pembangunan Manusia dan Infrastruktur Daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap *Coverage* Kepesertaan Informal. nilai R^2 sebesar 0,826335 menunjukkan bahwa variasi dalam variabel Indeks Pembangunan Manusia dan Infrastruktur Daerah dapat dijelaskan sebesar 82,63% dari variabel *Coverage* Kepesertaan Informal sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar model. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan ketersediaan infrastruktur yang memadai merupakan pilar kunci untuk memperluas cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan di sektor informal. IPM yang tinggi meningkatkan kesadaran dan kemampuan finansial untuk berpartisipasi, sementara infrastruktur (baik fisik maupun digital) mempermudah akses dan menciptakan kondisi bagi pertumbuhan sektor informal. Oleh karena itu, kebijakan yang sinergis antara pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan IPM melalui pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan, serta membangun infrastruktur yang merata, tidak hanya mendongkrak perekonomian tetapi juga membangun sistem perlindungan sosial yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia. Saran dari penelitian ini adalah pemerintah harus memperbesar kontribusi anggaran untuk bidang pendidikan dan kesehatan serta memperbaiki dan membangun infrastruktur dasar di daerah. Kolaborasi antar kedua unsur ini dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan ekonomi masyarakat, sehingga mereka dapat lebih mudah

mengakses dan berpartisipasi dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Indeks Pembangunan Manusia dan Infrastruktur sebagai faktor kunci, merupakan upaya perluasan cakupan kepesertaan informal yang dilakukan secara lebih terukur, efektif, dan berkelanjutan. Pendekatan yang holistik dan terintegrasi, dengan mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan spesifik setiap daerah, akan menjadi kunci keberhasilan dalam membangun sistem jaminan sosial yang inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya para pekerja sektor informal.

DAFTAR PUSTAKA

- Andjar, F. J. (2023). *Constraints of Participation in Social Security Program for Workers in the Informal Sector a Case Study in the City of Sorong*. 114–123. https://doi.org/10.2991/978-94-6463-146-3_12
- Anggita, A. V., Destina, P., & Rusnandari, C. R. (2024). Pengaruh Sosialisasi, Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Program BPJS Ketenagakerjaan Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Informal. *Business UHO: Jurnal Administrasi Bisnis*, 9(2), 827–839.
- Arrazeq, M. H., Azpha, R., Munthe, A. J., Siregar, H., & Berlianti. (2024). Bpjs Ketenagakerjaan: Jaminan Sosial Untuk Kesejahteraan Pekerja Indonesia. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 6(1), 6. <https://ejournal.warunayama.org/index.php/triwikrama/article/view/8025/7280>
- Lubis, A. S., Yani, F. A., Firzah, N., & Gurning, F. P. (2023). *PENGARUH INFRASTRUKTUR PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP KEIKUTSERTAAN PESERTA JKN DI INDONESIA*. 4(September), 2947–2955.
- Moh, Dashapatra, B., & Sahoo, C. K. (2025). Contributory social security and employment-based social protection for informal workers: moderating role of regulatory framework. *International Journal of Manpower*, 46(5), 836–852. <https://doi.org/10.1108/IJM-06-2024-0383>
- Muhlis, A. N. A. (2022). Determinants of the National Health Insurance Uptake in Indonesia. *Indonesian Journal of Health Administration*, 10(1), 111–121. <https://doi.org/10.20473/jaki.v10i1.2022.111-121>
- Nurhadi, Rahman, F., Ma'ruf, A., & Kafaa, K. A. (2024). *JAMINAN SOSIAL DI INDONESIA: SEJARAH, TEORI, DAN TANTANGAN MASA DEPAN* (V. P. Putra (ed.); Cetakan pe). Friedrich Ebert Stiftung.
- Nurhasna, F., & Dani, F. (2025). IMPACT OF INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT ON SOCIAL AND ECONOMIC CHANGE IN COMMUNITY. *Bina Bangsa International Journal of Business and Management (BBIJBM)*, 5(2), 160–191. <https://doi.org/10.71097/ijsat.v16.i2.5888>
- Pangesti, E. N., Resmi, S., & Utami, A. M. (2024). Pengaruh Kualitas Layanan dan Kepuasan Pelanggan terhadap Loyalitas Pelanggan pada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Gunungkidul. *Cakrawangsa Bisnis: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 5(1), 16. <https://doi.org/10.35917/cb.v5i1.481>
- Saragih, C. D., & Pasaribu, S. H. (2025). *PENGARUH JAMINAN SOSIAL TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI INDONESIA: STUDI PANEL PROVINSI TAHUN 2016-2024* CHAIRISA DWIFANI SARAGIH [IPB University]. <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/164392>